

Kasus Covid-19 Melambat, Bukan Berarti Aman

WONOSOBO (KR) - Kasus Covid-19 di zona merah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng) masih terus bertambah. Jumlah penderita positif Covid-19 tambah dua lagi pada Selasa (12/5), sehingga menjadi 56 dari 54 kasus sebelumnya.

"Meski demikian, secara umum mulai terjadi trend perlambatan pola penularan. Semoga saja, melambatnya pola penularan bisa terus melemah. Kendati demikian, bukan berarti kita sudah bebas dari Covid-19. Penularan masih terjadi," tandas Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Pen-

anganan (GTPP) Covid-19 Wonosobo dr Mohammad Riyatno.

Menurut Riyatno, penularan masih terjadi, namun berdasarkan hasil penelusuran riwayat kontak orang terdampak hingga orang-orang terdekat sampai level atau turunan lingkaran ke tiga, pola penularan menunjukkan

mulai melambat. Pasien positif Covid-19 yang sembuh juga terus meningkat. Dari total 56 kasus positif, 14 orang sudah dinyatakan sembuh.

Bupati Temanggung M Al Khadziq menyatakan, paparan Covid-19 di daerahnya terus berkembang. GTPP Covid-19 Temanggung mengonfirmasi ada penambahan dua kasus positif Covid-19 hasil swab dan 44 warga yang mengikuti *rapid test* hasilnya reaktif.

Menurutnya, sudah ratusan warga yang menjalani *rapid test*. Bagi yang hasilnya reaktif, harus

menjalani karantina dan pemeriksaan PCR atau tes swab. "Jika hasil PCR positif, akan dirawat di RSUD sedangkan yang negatif dikembalikan pada keluarga," kata dia.

Jubir GTPP Covid-19 Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Pribadi mengatakan, dua warga Kecamatan Bandongan dan Salaman, Kabupaten Magelang, dinyatakan positif Covid-19. Dengan tambahan dua orang ini, jumlah terkonfirmasi positif menjadi 30 orang. Sedangkan yang sudah dinyatakan sembuh lima orang. (Art/Osy/Bag)-d



Meninjau Kembali Ikhlas Kita

Oleh: Dr Muchlas MT



SEBUAH peristiwa menarik pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Khalid ibn Walid adalah seorang jenderal yang dalam kariernya sebagai panglima perang memiliki kondisi sangat baik di hadapan Khalifah, karena selalu sukses dalam setiap peperangan yang dipimpinnya. Khalifah Umar sebagai kepala pemerintahan saat itu merasa khawatir, jika hal ini dibiarkan nantinya akan terjadi gerakan kultus individu terhadap sang jenderal, sehingga memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatan sebagai panglima menjadi prajurit biasa.

Apa respons sang jenderal? Dalam riwayat disebutkan bahwa Khalid ibn Walid memberikan reaksi: "Saya berperang bukan karena Umar, tapi karena Allah". Sepertinya sang jenderal merasa bahwa berperang sebagai panglima maupun berperang sebagai prajurit biasa sama-sama mengharap ridha Allah SWT, bedanya hanya pada peran atau fungsinya saja.

Banyak ahli tafsir menyebut reaksi sang jenderal ini merupakan ekspresi seorang mukhlis, yakni sosok yang selalu beramal semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Kisah ini tentu sangat tepat digunakan sebagai referensi untuk membangun keikhlasan kita.

Mengapa demikian? Karena ikhlas menjadi syarat cukup agar aktivitas kita ditetapkan sebagai amal sholeh sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlasakan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus" (QS. Al-Bayyinah 98: 5). Kita perlu dengan sungguh-sungguh untuk menyematkan akhlak ikhlas ke dalam diri kita. Masalahnya darimana kita memulainya?

Prof Yunahar Ilyas menyebutkan, untuk membangun akhlak ikhlas ke dalam diri kita diperlukan usaha-usaha yang sistematis. Dalam pandangan beliau, membangun akhlak ikhlas itu memerlukan tiga syarat, yakni adanya niat karena Allah, menjaga amal dengan sebaik-baiknya dan hasil amal dapat dimanfaatkan dengan tepat.

Faktor niat sangat penting bagi seorang muslim yang akan melaksanakan suatu

amalan, karena akan menentukan status amal yang dikerjakan. Dikisahkan seorang laki-laki semula ingin tetap tinggal di Makkah, tetapi karena calon istrinya yakni Ummu Qais ingin hijrah bersama Rasulullah, maka laki-laki tersebut mengubah niatnya berencana hijrah tetapi dengan motivasi ingin menikahi calon istrinya

setibanya di Madinah. Menyikapi kasus ini, Rasulullah memberikan penegasannya bahwa "Barang siapa yang hijrah ingin memperoleh kedudukan, atau untuk mengawini seorang wanita, maka hijrahnya ialah ke arah yang ditujuinya itu". Setelah diawali dengan niat karena Allah SWT, langkah selanjutnya dalam membangun akhlak ikhlas adalah menjaga kualitas amal yang kita kerjakan. Seseorang yang beramal dengan ikhlas akan selalu sadar untuk selalu melakukan perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) terhadap amal yang sedang dijalani. Semua pekerjaan akan dilakukan dengan etos kerja, profesionalisme, disiplin, dan militansi yang tinggi, sehingga seluruh pekerjaan yang dilakukan memiliki kualitas yang tinggi pula.

Terkait dengan amal yang berkualitas ini, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT menyukai, bila seseorang beramal, dia melakukannya dengan sebaik-baiknya". Agar kita selalu *on the right track* dalam menapaki usaha-usaha membangun keikhlasan, di ujung *timeline* kita perlu menjaga agar amal yang kita kerjakan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Bulan puasa yang bersamaan dengan pandemi virus Covid-19 ini perlu kita sikapi dengan akhlak ikhlas. Kita niat agar seluruh amalan kita di bulan puasa ini, dilakukan hanya semata-mata ingin memperoleh ridha Allah SWT, diteruskan dengan menjaga agar ibadah dan aktivitas pekerjaan (sekalipun dilakukan melalui *work from home*) tetap memiliki kualitas yang tinggi, dan pada akhirnya harus diupayakan agar seluruh amalan kita dapat bermanfaat bagi kemaslahatan dan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Wallahu a'lam. (*)-z

Dr Muchlas MT, Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

FRAKSI DEMOKRAT TOLAK PENGESAHAN RUU Minerba Resmi Jadi Undang-undang

JAKARTA (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang mengenai Mineral dan Batubara (Minerba) atas Revisi Perubahan UU No 4/2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang Paripurna, Selasa (12/5) di Jakarta, memutuskan pembentukan UU tersebut dapat disahkan. Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya yang menolak RUU Minerba disahkan.

Rapat Paripurna DPR melakukan pembahasan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam pembahasan revisi UU Minerba tersebut

Komisi VII DPR bersama pemerintah mengadakan rapat kerja (raker), Senin (11/5) dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I. Dalam raker tersebut, Komisi VII DPR dan pemerintah menyetujui revisi UU Minerba dan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU.

Rapat Paripurna DPR juga mengagendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

menjadi Undang-Undang.

Sebelum disahkan, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dalam laporannya mengatakan, berdasarkan pembicaraan di tingkat pertama delapan fraksi menyetujui revisi UU Minerba untuk diundangkan.

"Kami menyadari RUU Minerba ini belum menyangkan semua pihak, namun UU ini akan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini terutama yang berkaitan dengan tata kelola kegiatan pertambangan di Indonesia," ujar Sugeng.

Dalam perjalanannya pengesahan RUU Minerba sempat tertunda pada akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 dan disepakati menjadi RUU yang di *carry over*. Pembahasan dimulai kembali pada rapat kerja antara komisi VII DPR de-

ngan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ES-DM) 13 Februari 2020.

Dalam rapat tersebut juga melanjutkan pembahasan tingkat I lanjutan dengan tahapan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) sebanyak 938 DIM dan pembentukan panja RUU Minerba. Pembahasan pun dilakukan secara intensif mulai 17 Februari hingga 6 Mei 2020.

RUU Minerba juga telah disinkronisasikan dengan RUU Cipta Kerja sebagai mana keinginan pemerintah. Hasil sinkronisasi tersebut menghasilkan perubahan substansi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terutama yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral, penyesuaian nomnkelatur izin dan kebijakan terkait divestasi saham. (Ant)-d

TERIMA 3 KALI, RP 600.000 PERBULAN

65.845 KK Terima BLT Dana Desa

KEBUMEN (KR) - Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang anggarannya diambilkan dari Dana Desa, mulai dibagikan. Di Kabu-

paten Kebumen, Jawa Tengah, sebanyak 65.845 Kepala Keluarga (KK) tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebesar Rp 600.000 perbulan yang bakal diterima selama tiga

kali atau tiga bulan.

"Total anggaran BLT Dana Desa di Kabupaten Kebumen mencapai lebih dari Rp 118 miliar. Anggaran ini untuk membantu warga yang berhak, jumlahnya 65.845 Kepala Keluarga,"

terang Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz saat kemarin hari pertama pencairan BLT Dana Desa di Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren, Selasa (12/5).

BLT Dana Desa diberikan kepada warga miskin terdampak Covid-19 yang belum terkover program lain dari pemerintah. Keterangan Kepala Desa Bocor Slamet, awalnya jumlah warga Desa Bocor yang diusulkan menerima BLT Dana Desa sebanyak 237 KK, namun setelah diverifikasi hanya 143 KK yang memenuhi syarat.

Menurut Slamet, total anggaran yang digunakan untuk BLT Dana Desa Rp 257,4 juta. Jumlah tersebut, 30 persen dari total Dana Desa sebesar Rp 858,7 juta. Untuk tahap pertama, disalurkan Rp 85,8 juta. (Suk)-z



Warga Desa Bocor, Buluspesantren, Kebumen, menanti giliran menerima BLT Dana Desa.

PENYELESAIAN RS AKADEMIK UGM

Sebelum Lebaran, Rampung

JAKARTA (KR) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melanjutkan pembangunan Rumah Sakit (RS) Akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai RS rujukan penanganan Covid-19 di DIY yang sudah sempat dibangun namun terhenti pada tahun 2010.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Selasa (12/5) mengatakan, berdasarkan hasil penilaian teknis Balitbang PUPR, secara struktur gedung RS masih baik dan bisa dipakai. Penyelesaian RS Akademik UGM tersebut merupakan bagian dari refocusing kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp 1,829

triliun untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19. Saat ini progres penyelesaian pembangunan secara keseluruhan mencapai 60 persen dan diharapkan dapat rampung sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2020.

RS Akademik UGM memiliki kapasitas total sebanyak 107 tempat tidur dengan rincian 80 tempat tidur rawat inap, 2 tempat tidur ruang tindakan dan 25 tempat tidur ruang isolasi. Gedung Yudhistira dengan luas 4.177 m2 memiliki kapasitas 38 tempat tidur. Gedung Arjuna dengan luas 4.505 m2 memiliki kapasitas 69 tempat tidur. (Lmg)-d

YOGYA (KR) - Penambahan jumlah warga yang positif Covid-19 di DIY, tak membuat sebagian masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Selain jalanan yang masih ramai, masyarakat juga mulai nongkrong di kafe atau di warung makan.

Oleh karena itu, petugas gabungan TNI, Polda DIY dan Satpol PP, mengintensifkan patroli untuk mengimbau dan membubarkan kerumunan massa. Bahkan Brimob Polda DIY menerjunkan personelnya bergabung bersama tim tersebut untuk patroli sekaligus membubarkan warga yang berkerumun.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda DIY Kombes Pol Imam Suhadi

SIK menjelaskan, petugas gabungan melakukan patroli Senin (11/5) malam pukul 21.00 hingga Selasa (12/5) dini hari. Patroli dilakukan di sejumlah titik rawan keramaian, antara lain sepanjang Jalan Gedongkuning, Jalan Pramuka, Jalan Tamansiswa, Jalan Sultan Agung, Alun-alun Utara, Pasar Ngasem dan Pakualaman.

Dari patroli itu, petugas gabungan menemukan belasan lokasi yang ramai dengan kerumunan massa. Menurut Kombes Imam, tempat yang mayoritas menjadi tempat tongkrongan warga adalah warung makan dan kafe. Sedangkan mereka yang makan sambil nongkrong, rata-ra-

DIFOKUSKAN BANTU SENIMAN DAN BUDAYAWAN Danais Bisa untuk Dampak Covid-19

YOGYA (KR) - Dana Keistimewaan (Danais) bisa dipergunakan untuk menanggulangi Covid-19 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/PMK.07/2020. Dengan adanya amanat tersebut, Danais bisa dialokasikan bagi penanganan wabah virus Corona di DIY sesuai dengan fokus urusan kebudayaan yaitu menanggulangi dampak Covid-19 bagi sekitar 3.708 seniman dan budayawan di DIY.

Paniradya Pati Kaistimewaan Beny Suharsono mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti suara masyarakat dan stakeholder dengan membuat Surat Edaran (SE) yang menghentikan kegiatan yang memang bisa dihentikan, memperkeat pengadaan yang sifatnya pengadaan barang dan jasa

dihentikan dan digeser alokasinya ke triwulan berikutnya danais 2020 khususnya termin pertama.

"Belum lama ini telah keluar PMK No.35 yang salah satunya berisi danais bisa dimanfaatkan dalam menanggulangi Covid-19 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Itu adalah amanat yang tegas, karena awal-awal kurang tegas mengingat danais diusulkan dan dikelola Pemda DIY dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Mekanisme danais ini tidak sama dengan mekanisme APBD reguler meskipun satu kesatuan. Kita lebih tegas lagi dengan mengeluarkan SE danais yang melalui BKK bisa direlokasi dan difokuskan guna penanggulangan Covid-19," jelas Beny di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan, Selasa (12/5).

Beny mengungkapkan angka-angka tersebut tengah dikumpulkan guna dialokasikan bagi penanggulangan Covid-19 di DIY dengan melalui refocusing APBD karena danais adalah bagian dari APBD. Jika angkanya sudah muncul maka akan segera dilakukan verifikasi, mengingat serapan danais termin I lebih dari 80 persen maka Pemda DIY mempunyai hak meminta transfer tahap kedua.

"Begitu terjadi wabah Covid-19, kami punya kewajiban untuk mengusulkan perubahan danais salah satunya guna penanggulangannya di DIY. Danais 2020 itu untuk refocusing, danais 2021 untuk menahan dan danais 2022 untuk pemberdayaan masyarakat, usulan dari wilayah serta perhatian aspek-aspek berkesinambungan," paparnya. (Ria/Ira)-d

ABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN

Brimob Bubarkan Kerumunan Massa

ta masih usia produktif. Selain melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap para pengunjung, petugas juga langsung meminta mereka membubarkan diri.

"Jika ingin menikmati makanan atau minuman,

kami sarankan untuk dibungkus dan dikonsumsi di rumah. Imbauan ini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19," ungkap Kombes Imam, kemarin.

Sementara seorang napi asimilasi dari Rutan Nu-



Petugas gabungan membubarkan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

sakambangan, SR (39), warga Jeketro Kledung Temanggung ditangkap Polres Temanggung karena berubah dengan melakukan pemerasan dan mengancam. Kasubag Humas Polres Temanggung AKP Heny Widiyanti Selasa (12/5) mengatakan, tersangka memeras dan mengancam korban SH, warga Dusun Palagan Desa Tegalsari Kecamatan Kedu, Jumat dan Minggu lalu.

Tersangka dan seorang temannya menemui korban untuk meminta sejumlah uang. Korban memberikan Rp 150 ribu. Pada Minggu kembali datang dan meminta uang. Ia diduga usai meminum minuman beralkohol. (Ayu/Osy)-z